



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan R.A Basoeni Nomor 35 Sooko Mojokerto, Jawa Timur Kode Pos 61361
Telp. (0321) 322814 Fax. (0321) 328788 Website: <http://www.mojokertokab.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/32223/ HK / 416 - 050 / 2023
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024**

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang — undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan **Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**) lembar Negara RI Tahun 1999 Nomor **75, Tambahan** Lembaran Negara RI Nomor 3851), Undang — undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan **Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003** Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang **Tahapan, Tata Cara** Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi **Pelaksanaan Rencana Pembangunan** Daerah;

4. Peraturan Pemerintah **Nomor 18 Tahun 2016** tentang **Perangkat** Daerah

5. Peraturan Daerah **Kabupaten** Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 **tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten** Mojokerto Tahun 2005 - 2025;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 — 2021 (Lembaran Daerah **Kabupaten** Mojokerto Tahun 2016a Nomor 7);

8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

MEMUUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Tahun 2024.
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Renja Sekretariat DPRD;
- KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) Sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP
- LAMPIRAN
- KEEMPAT : Uraian Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud diktum Kedua, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal, Desember 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO





**P E M E R I N T A H
KABUPATEN MOJOKERTO**



**RENCANA KERJA
(RENJA)**

TAHUN ANGGARAN 2024

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana kerja Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan penyusunannya secara rinci acuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Namun kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya, kepada kita semua.Amin

DAFTAR ISI

KataPengantar.....	i
DaftarIsi	ii
BABI PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud danTujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah TahunLalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	10
2.4 Review Terhadap RancanganAwal RKPD	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III TUJUAN DAN SASARANPERANGKATDAERAH	25
3.1 Telaahan terhadap KebijakanNasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	25
3.3 Program dan Kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAANPERANGKATDAERAH	38
Bab V PENUTUP	42

BAB I

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dalam penyusunannya Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi

kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang).
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 4)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.
30. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 188/27/416-050/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Sedang tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rancangan Awal Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kejadian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan, isu-isu penting penyelenggaraan, tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target, kinerja Renstra OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang usulan Rencana Kerja dan pendanaan OPD pada APBD tahun 2024. Disini terdapat program kegiatan yang sudah dianggarkan di Program dan kegiatan kinerja Renstra OPD Tahun 2021-2026.

BAB V PENUTUP

Berisikan urusan penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DPRD pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten Mojokerto. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pencapaian kinerja prgram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah terlaksananya Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Sewkretariat DPRD Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 91,88%
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 94,80%
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 90,55%
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan:
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 87,88%
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99,26%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 96,86%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0%
 - Penyediaan bahan/ material 87,78%

- Fasilitas Kunjungan Tamu 93,93%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 94,85%
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96,26%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 98,25%
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 96,27%
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 84,33%
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 74,16%
- g) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 98,02%
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 92,62%
 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 66,97%
- h) Layanan Administrasi DPRD
 - Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 95,59%

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Pencapaian kinerja program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah terlaksananya Tri Fungsi Dewan (Legislasi, Budgeting dan Pengawasan) serta terfasilitasinya Hak DPRD sesuai peraturan yang berlaku.

Kegiatan :

- a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD. Dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 84,03%
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 82,43%

- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik 96,29%
- b) Pembahasan Kebijakan Anggaran. Dengan sub kegiatan
 - Pembahasan KUA dan PPAS 93,08%
 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 74,70%
 - Pembahasan APBD 85,64%
 - Pembahasan APBD Perubahan 84,84%
 - Pembahasan Laporan Semester 95,34%
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 97,58%
- c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 99,00%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 91,52%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 95,28%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 94,87%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 92,47%
 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 91,64%
 - Pengawasan Penggunaan Anggaran 85,02%
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 98,05%
- d) Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Bimbingan Teknis DPRD 78,65%
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan 99,59%
 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 94,92%
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 54,40%
 - Penyusunan Program Kerja DPRD 93,85%
- e) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 96,94%
 - Pelaksanaan Reses 96,41%
- f) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- Pengawasan Kode Etik DPRD 91,22%

g) Fasilitasi Tugas DPRD

- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 96,84%
- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 96,43%
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 85,98%
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 95,30%

Secara umum capaian realisasi anggaran dari 15 (limabelas) kegiatan dengan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan di atas mencapai 93,96%. Selanjutnya pencapaian Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto sebagaimana terdapat pada Tabel TC-29.

Tabel.1.1. (T C 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Rensra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi 2023		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (n-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai SAKIP	81,38	78,68	79	80,25	105 %	80,50	80,50%	98,61 %
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2	2	2	100	2	4	40%

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	6	6	6	100	6	12	40%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran perangkat daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN per bulan	27	27	27	27	100	27	27	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN	85	80	81	90,25	111	92	90,25	120%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	350	70	70	70	100	70	140	40%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	5	5	5	100	5	10	40%

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	24	40%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	1	1	1	100	1	2	40%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	1	1	0	0	0	1	20%
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket Bahan/Material yang Disediakan								
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60	12	12	12	100	12	24	40%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	60	12	12	12	100	12	24	40%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	12	12	12	100	12	24	40%

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	180	36	36	36	100	36	72	40%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	120	24	24	24	100	24	48	40%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	1	100
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	290	58	58	58	100	58	116	40%
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi								
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak Keuangan DPRD	50	50	50	50	100	50	50	100%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	15	3	3	3	100	3	6	40%

	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	60	39	50	36	72%	50	75	12,5 %
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi								
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat DPRD	60	12	12	12	100	12	24	40%
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
		Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi								
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi								
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	2	2	2	100%	2	4	40%
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	20	6	6	5	83%	8	11	55%
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan /	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau	20	4	3	2	66%			

	atau Naskah Akademik	Naskah Akademik								
		Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi								
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas								
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	5	1	1	1	100	1	2	40%
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	5	1	1	1	100	1	2	40%
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan APBD	5	1	1	1	100	1	2	40%
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	5	1	1	1	100	1	2	40%
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi pelaksanaan APBD per Semester	5	1	1	1	100	1	2	40%
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5	1	1	1	100	1	2	40%

		Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi								
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi								
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	20	4	4	4	100	4	8	40%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur	10	2	2	2	100	2	4	40%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20	4	4	4	100	4	8	40%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20	4	4	4	100	4	8	40%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	10	2	2	2	100	2	4	40%

	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen hasil Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	5	1	1	1	100	1	2	40%
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	10	2	2	2	100	2	4	40%
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5	1	1	1	100	1	2	40%
		Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan								
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi								
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	30	6	6	6	100	6	12	100
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, Publikasi dan Dokumentasi dewan	60	12	12	12	100	12	24	40%
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100	24	20	22	110	20	46	46%

	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	150	30	30	24	80%	30	44	29%
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana Kerja DPRD	5	1	1	1	100	1	2	40%
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi								
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang disusun	5	1	1	1	100	1	2	40%
	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	14	3	3	3	100	2	6	42,85 %
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan Kode Etik DPRD	10	2	2	2	100	2	4	40%
	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Tugas DPRD terfasilitasi								
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20	4	4	4	100	4	8	40%

	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan Kinerja fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	5	1	1	1	100	1	2	40%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Banmus yang Terasilitasi	10	2	2	2	100	2	4	40%
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang Terasilitasi	20	4	4	4	100	4	8	40%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan sidang-sidang serta mengelola urusan dalam dan keuangan DPRD juga penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tabel TC 30

Tabel 1.2.(T-C 30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2020 (thn n-3)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-3)	tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024 (thn n+1)	
		4	5	6	7		8	9	10		11		12	13
	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Kesekretariatan DPRD			70%					70.16%					
	Persentase Perda yang disyahkan			85%					100%					
	Persentase pemenuhan hak DPRD sesuai peraturan			85%					89%					
	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi.				75	75	80			60%	83,33%		90%	
	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi				90	90	91			90%	100%		100%	
	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi				80	81	85			80%	100%		100%	
	Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan				90	90	90			90%	99,5%		95%	

Sebagaimana Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 bahwa di Tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto menetapkan besaran Indikator Kinerja Utama yaitu IKM DPRD sebesar 91,5.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja melalui metode survey dan wawancara kepada anggota DPRD di semester I dan Semester II, maka diperoleh hasil survey nilai indeks kepuasan DPRD di akhir tahun 2023 dengan nilai realisasi kinerja sebesar 93,58 atau mencapai 100,22% atau kategori BAIK.

Perolehan angka indeks tersebut dihitung berdasarkan ketentuan unsur- unsur pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik dengan mempertimbangkan unsur pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi digabung maka unsur pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto di Tahun 2023 mempunyai nilai kinerja sebesar 93,58.

Dari capaian kinerja tersebut diketahui bahwa target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD ditahun 2023 yaitu sebesar 91,5 telah terpenuhi dan bahkan memperoleh capaian kinerja melebihi target sebesar 0,22 atau presentase capaian melebihi target sebesar 0,22%.

Untuk lebih detailnya dengan unsur pelayanan mempertimbangkan TUPOKSI dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Nilai rata-rata FASILITAS UMUM 53 dengan interpretasi Fasilitas Umum perlu ditingkatkan.
- b. Nilai rata-rata FASILITAS RUANG RAPAT 63,00 dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- c. Nilai rata-rata FASILITAS RUANG KERJA/ FRAKSI sebesar 63 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- d. Nilai rata-rata FASILITAS MAKANAN DAN MINUMAN sebesar 63 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- e. Nilai rata-rata FASILITAS ANGGARAN sebesar 56,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- f. Nilai rata-rata FASILITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) sebesar 54,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- g. Nilai rata-rata FASILITAS PERSONAL sebesar 52,33 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- h. Nilai rata-rata FASILITAS KEGIATAN sebesar 50,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- i. Nilai rata-rata FASILITAS INFORMASI sebesar 49,33 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.

Dari Nilai rata-rata persepsi yang diperoleh dari 4 (Empat) bagian di Sekretariat DPRD dapat diketahui bahwa 4 (empat) bagian tersebut telah melampaui capaian kinerjanya, tetapi diharapkan Bagian-bagian tersebut lebih dapat meningkatkan layanannya kepada segenap anggota DPRD.

Dan apabila ke 9 (sembilan) angka indeks tersebut diatas diakumulasikan ke dalam angka IKM, maka diperoleh angka 93,58.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto maka untuk memberikan pelayanan yang prima kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya sebagai Badan Legislatif Daerah yang mencerminkan makna strategis dan mencerminkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Mojokerto, maka dalam upaya untuk mendukung tugas organisasi tersebut Sekretariat DPRD merumuskan Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan sebagai landasan atau dasar dalam acuan kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi DPRD;
- c. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto pada TA. 2024 adalah sebagaimana tabel TC 31 Review terhadap rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan proses membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (riil) dalam RenjaSKPD.

Berkaitan hal tersebut, maka hasil proses membandingkan antara rancangan akhir RKPD Kabupaten Mojokerto dengan Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto telah sesuai.

Tabel 2.1 (TC.31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	MOJOKERTO	Nilai SAKIP	81 (A)	42.745.435.074	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	MOJOKERTO	Nilai SAKIP	81 (A)	47.535.000.000	
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MOJOKERTO	Persentase indikator program PD yang tercapai sesuai target	90 %	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MOJOKERTO	Persentase indikator program PD yang tercapai sesuai target	90 %	30.000.000	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	15.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	15.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase realisasi anggaran perangkat daerah	84%	3.400.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	MOJOKERTO	Presentase realisasi anggaran perangkat daerah	84%	3.400.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	MOJOKERTO	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan	3.400.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	MOJOKERTO	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan	3.400.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN	90,6%	350.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	MOJOKERTO	IP ASN	90,6%	650.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	350.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	MOJOKERTO	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	600.000.000	

			Undangan								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	MOJOKERTO	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100%	835.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	MOJOKERTO	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100%	3.865.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MOJOKERTO	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	250.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MOJOKERTO	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	2.500.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	MOJOKERTO	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	MOJOKERTO	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	50.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	100.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	MOJOKERTO	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	250.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	15.000.000	

	Penyediaan Bahan/Material	MOJOKERTO	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	100.000.000	Penyediaan Bahan / Material	MOJOKERTO	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	200.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	150.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	300.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	550.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	83 %	2.280.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MOJOKERTO	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	83 %	2.600.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	600.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	700.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 laporan	1.680.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.900.000.000	

			Kantor yang Disediakan								
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MOJOKERTO	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	83%	800.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MOJOKERTO	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	83%	2.650.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	27 unit	550.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	27 unit	650.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MOJOKERTO	Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik	1 unit	100.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MOJOKERTO	Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik (Penyediaan Jasa kebersihan Kantor) dan Peralatan Kerja yang Terpelihara	1 unit	1.500.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	48 unit	150.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	MOJOKERTO	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	48 unit	500.000.000	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan	MOJOKERTO	Persentase Layanan Keuangan dan	91%	34.357.804.074	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	MOJOKERTO	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	91%	33.590.000.000	

	n DPRD		Kesejahteraan DPRD terfasilitasi					terfasilitasi			
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang/bln	33.472.804.474	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang/bln	33.000.000.000	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 paket	800.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 paket	500.000.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	85.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	90.000.000	
	Layanan Administrasi DPRD	MOJOKERTO	Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi	100%	750.000.000	Layanan Administrasi DPRD	MOJOKERTO	Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi	100%	750.000.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 laporan	700.000.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 laporan	750.000.000	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	MOJOKERTO	Prosentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	10 dokumen	54.754.564.926	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	MOJOKERTO		10 dokumen	39.502.380.000	

			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi	70%	8.892.043.126			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi	70%	47.370.000.000	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	MOJOKERTO	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	80%	8.892.043.126	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	MOJOKERTO	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	80%	7.900.000.000	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 dokumen	1.200.000.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 dokumen	600.000.000	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 dokumen	3.392.043.126	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 dokumen	4.500.000.000	

	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 dokumen	3.800.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	MOJOK ERTO	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 dokumen	2.500.000.000	
	Penyusunan tata tertib DPRD	MOJOKERTO	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang d susun	1 dokumen	500.000.000	Penyusunan tata tertib DPRD	MOJOKE RTO	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang d susun	1 dokumen	300.000.000	
			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi	90%	8.110.000.000			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi	90%	8.500.000.000	
	Pembahasa n Kebijakan Anggaran	MOJOKERTO	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas	90%	8.110.000.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	MOJOK ERTO	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas	90%	8.500.000.000	
	Pembahasa n KUA dan PPAS	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	1.600.000.000	Pembahasan KUA dan PPAS	MOJOK ERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	1.200.000.000	
	Pembahasa n Perubahan KUA dan Perubahan	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan	1 dokumen	1.600.000.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	MOJOK ERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	1.200.000.000	

	PPAS		PPAS								
	Pembahasan APBD	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	10.000.000	Pembahasan APBD	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	3.200.000.000	
	Pembahasan APBD Perubahan	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	1.600.000.000	Pembahasan APBD Perubahan	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	1.200.000.000	
	Pembahasan Laporan Semester	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	900.000.000	Pembahasan Laporan Semester	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	500.000.000	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	2.400.000.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	1.200.000.000	
			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi	85%	16.400.000.000			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi	85%	1.900.000.000	

	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	MOJOKERTO	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi	85%	16.400.000.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	MOJOKERTO	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi	85%	1.900.000.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 laporan	3.000.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 laporan	1.800.000.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2 laporan	1.700.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2 laporan	900.000.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 laporan	3.000.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 laporan	1.800.000.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 laporan	3.200.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 laporan	1.800.000.000	

	Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Sumber Daya Alam	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Sumber Daya Alam	2 laporan	1.700.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Sumber Daya Alam	MOJOK ERTO	Jumlah Laporan Hasil Pengawas an Urusan Pemerintah an Bidang Sumber Daya Alam	2 laporan	900.000.000	
	Pengawas an Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 laporan	1.000.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	MOJOK ERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 laporan	600.000.000	
	Pengawas an Penggunaa n Anggaran	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 dokumen	1.200.000.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	MOJOK ERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 dokumen	600.000.000	
	Pembahasa n Laporan Keterangan Pertanggung gjawaban Kepala Daerah	MOJOKERTO	Jumlah Rekomenda si Hasil Pembahasa n Laporan Keterangan pertanggungj awaban Kepala Daerah	1 dokumen rekomendasi	1.600,000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah	MOJOK ERTO	Jumlah Rekomenda si Hasil Pembahasa n Laporan Keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah	1 dokumen rekomendasi	1.500,000.000	
			Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan	90%	21.352.521.800			Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan	90%	5.350.000.0000	

	Peningkatan Kapasitas DPRD	MOJOKERTO	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	90%	5.643.106.800	Peningkatan Kapasitas DPRD	MOJOKERTO	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	90%	5.350.000.000	
	Orientasi DPRD	MOJOKERTO	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	1 dokumen	532.391.000	Orientasi DPRD	MOJOKERTO	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	1 dokumen	500.000.000	
	Pendalaman Tugas DPRD	MOJOKERTO	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6 dokumen	3.260.715.800	Pendalaman Tugas DPRD	MOJOKERTO	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6 dokumen	3.200.000.000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 dokumen	750.000.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 dokumen	700.000.000	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	MOJOKERTO	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang	175.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	MOJOKERTO	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang	150.000.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	MOJOKERTO	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	70 orang	75.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	MOJOKERTO	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	70 orang	200.000.000	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	850.000.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	600.000.000	

	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	MOJOKERTO	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi	100%	870.000.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	MOJOKERTO	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi	100%	2.820.000.000	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	70.000.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	120.000.000	
	Pelaksanaan Reses	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	800.000.000	Pelaksanaan Reses	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	2.700.000.000	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	MOJOKERTO	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi	81%	850.000.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	MOJOKERTO	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi	81%	500.000.000	
	Penyusunan kode Etik DPRD	MOJOKERTO	Jumlah dokumen kode etik dan tata beracara DPRD	1 dokumen	350.000.000	Penyusunan kode Etik DPRD	MOJOKERTO	Jumlah dokumen kode etik dan tata beracara DPRD	1 dokumen	200.000.000	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	MOJOKERTO	Jumlah laporan hasil pengawasan Kode Etik DPRD	4 laporan	500.000.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	MOJOKERTO	Jumlah laporan hasil pengawasan Kode Etik DPRD	4 laporan	300.000.000	
	Fasilitasi Tugas DPRD	MOJOKERTO	Persentase Tugas DPRD terfasilitasi	81%	13.989.415.000	Fasilitasi Tugas DPRD	MOJOKERTO	Persentase Tugas DPRD terfasilitasi	81%	12.400.000.000	
	Koordinasi dan Konsultasi	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	4 dokumen	6.237.663.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi	4 dokumen	7.000.000.000	

	Pelaksanaan Tugas DPRD		dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Tugas DPRD		Pelaksanaan Tugas DPRD			
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Kinerja Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	850.000.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Laporan Kinerja Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	900.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2 dokumen	1.200.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2 dokumen	1.000.000.000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 dokumen	5.701.752.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 dokumen	3.500.000.000	

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Merupakan deskripsi hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten kota yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sehubungan hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tidak melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dimaksud dikarenakan tidak adanya keterkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tabel 2.2. (TC 32) Usulan Program dan Kegiatan dari Kepentingan tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Perpres Nomor 27 tahun 2015 tentang sekretariat Jendral DPRD RI dan badan Keahlian DPR RI. Sekretariat jendral DPR RI adalah unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan yang tugasnya memberikan bantuan teknis, Administratif dan bantuan keahlian.

Sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan sidang-sidang serta mengelola urusan dalam dan keuangan DPRD juga penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi kepala daerah dengan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam perubahan RPJMD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tetap menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : **“Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal”**.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang

akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktotor sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka Sekretariat DPRD tidak mengubah sasaran Perangkat Daerah dan tetap menetapkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD”.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujua/Sasaran	Capaian 2023	Target 2024
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Sekretariat DPRD	92,56	93
		Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Sekretariat DPRD	92,56	93

3.3. Program dan Kegiatan

a. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

b. Adapun program-program di tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut
Program Utama :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;

Dari program tahun 2024 tersebut diatas diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

- 1.1 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - 1.1.1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - 1.1.2 Pembahasan Rancangan Perda
 - 1.1.3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - 1.1.4 Fasilitasi Penyusunan Tata tertib DPRD
- 1.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 1.2.1 Pembahasan KUA dan PPAS
 - 1.2.2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 1.2.3 Pembahasan APBD
 - 1.2.4 Pembahasan Perubahan APBD
 - 1.2.5 Pembahasan Laporan Semester
 - 1.2.6 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 1.3 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 1.3.1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - 1.3.2 Pelaksanaan Reses
- 1.4 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - 1.4.1 Penyusunan Kode Etik DPRD
 - 1.4.2 Pengawasan Kode Etik DPRD
- 1.5 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 1.5.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - 1.5.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - 1.5.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 1.5.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - 1.5.5 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam

- 1.5.6 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- 1.5.7 Pengawasan Penggunaan Anggaran
- 1.5.8 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 1.6 Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 1.6.1 Orientasi DPRD
 - 1.6.2 Pendalaman Tugas DPRD
 - 1.6.3 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - 1.6.4 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - 1.6.5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - 1.6.6 Penyusunan Program Kerja DPRD
- 1.7 Fasilitasi Tugas DPRD
 - 1.7.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPR
 - 1.7.2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - 1.7.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - 1.7.4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
 - 2.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 2.3.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 2.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 2.4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 2.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- undangan Penyediaan Bahan/Material
- 2.4.5 Fasilitas Kunjungan Tamu
- 2.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 2.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.4.6 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2.4.7 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2.5.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 2.5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2.6 Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD
 - 2.6.1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - 2.6.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - 2.6.3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 2.7 Layanan Administrasi DPRD
 - 2.7.1 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Sedangkan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 sebagaimana perubahan RPJMD dan

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
tertuang dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025

OPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai SAKIP	Setwan	81 (BB)	42.745.435.074	APBD		81,5 (A)	
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Setwan	1				1	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	Setwan	90%	10.000.000	APBD		91%	44.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setwan	2 dokumen	5.000.000	APBD		2 dokumen	22.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setwan	6 laporan	5.000.000	APBD		4 dokumen	22.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran perangkat daerah	Setwan	85%	3.400.000.000	APBD		86%	6.000.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Setwan	27/ bulan	3.400.000.000	APBD		14 bulan	6.000.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN	Setwan	83	350.000.000	APBD		84%	860.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Setwan	27 Stel/1 paket		APBD		30 stel	60.000.000

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Setwan	70 orang	350.000.000	APBD		7 kegiatan	800.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	Setwan	100%	835.000.000	APBD		100%	4.230.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Setwan	3 paket	250.000.000	APBD		3 paket	2.660.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Setwan	12 paket	35.000.000	APBD		1 paket	55.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Setwan	1 paket	100.000.000	APBD		1 paket	250.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Setwan	1 dokumen	00	APBD		1 paket	15.000.000
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket Bahan/Material yang Disediakan	Setwan	12 paket	100.000.000	APBD		1 paket	250.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Setwan	12 laporan	150.000.000	APBD		12 bulan	300.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Setwan	12 laporan	200.000.000	APBD		12 bulan	700.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Setwan	84 %	2.280.000.000	APBD		84 %	3.350.000.000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Setwan	12 laporan	600.000.000	APBD		12 bulan	850.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Setwan	12 laporan	1.680.000.000	APBD		12 bulan	2.500.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Setwan	84 %	800.000.000	APBD		85 %	2.700.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan d bayarkan pajak dan perijinannya	Setwan	27 unit	550.000.000	APBD		27 unit	700.000.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Setwan	1 unit	100.000.000	APBD		1 unit	1.500.000.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Setwan	58 unit	150.000.000	APBD		58 unit	500.000.000
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi	Setwan	92%	34.357.804.074	APBD		93%	40.150.000.000
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak Keuangan DPRD	Setwan	50 orang/ bulan	33.472.804.474	APBD		50 orang/ bulan	40.000.000.000
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Setwan	3 paket/org	800.000.000	APBD		3 paket/org	550.000.000
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	Setwan	30 orang	85.000.000	APBD		30 orang	95.000.000

	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi	Setwan	100%	750.000.000	APBD		100%	850.000.000
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat DPRD	Setwan	12 laporan	700.000.000	APBD		12 laporan	850.000.000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		87,5%	54.754.564.926			87,5%	84.070.000.000
		Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi		80%	8.892.043.126			80%	12.000.000.000
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	Setwan	80%	8.892.043.126	APBD		80%	12.000.000.000
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Setwan	2 dokumen	1.200.000.000	APBD		2 dokumen	2.000.000.000
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Setwan	8 dokumen	3.392.043.126	APBD		4 dokumen	5.000.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Setwan	4 dokumen	3.800.000.000	APBD		4 dokumen	5.000.000.000
	Penyusunan tata tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	Setwan	1 dokumen	500.000.000	-	-	-	-
		Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi		90%	8.110.000.000			90%	18.000.000.000
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas	Setwan	90%	8.110.000.000	APBD		90%	18.000.000.000
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	Setwan	1 dokumen	1.600.000.000	APBD		1 dokumen	2.500.000.000

	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Setwan	1 dokumen	1.600.000.000	APBD		1 dokumen	2.500.000.000
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan APBD	Setwan	1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	5.500.000.000
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	Setwan	1 dokumen	1.600.000.000	APBD		1 dokumen	2.500.000.000
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi pelaksanaan APBD per Semester	Setwan	1 dokumen	900.000.000	APBD		1 dokumen	1.500.000.000
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Setwan	1 dokumen	2.400.000.000	APBD		1 dokumen	3.500.000.000
		Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi		90%	16.400.000.000			90%	27.000.000.000
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi	Setwan	90%	16.400.000.000	APBD		90%	27.000.000.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Setwan	4 laporan	3.000.000.000	APBD		24 kegiatan	5.000.000.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur	Setwan	2 laporan	1.700.000.000	APBD		12 kegiatan	3.000.000.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Setwan	4 laporan	3.000.000.000	APBD		24 kegiatan	5.000.000.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Setwan	4 laporan	3.200.000.000	APBD		24 kegiatan	5.000.000.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Setwan	2 laporan	1.700.000.000	APBD		12 kegiatan	3.000.000.000

	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen hasil Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	Setwan	1 dokumen	1.000.000.000	APBD		1 dokumen	1.500.000.000
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Setwan	2dokumen	1.200.000.000	APBD		12 kegiatan	2.000.000.000
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Setwan	1 dokumen	1.600.000.000	APBD		1 dokumen	2.500.000.000
		Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan		90%	21.352.521.800			90%	27.070.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	Setwan	90%	5.643.106.800	APBD		90%	6.200.000.000
	Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	Setwan	1 dokumen	532.391.000	-	-	-	-
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	Setwan	6 dokumen	3.260.715.800	APBD		6 dokumen	4.500.000.0000
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, Publikasi dan Dokumentasi dewan	Setwan	12 dokumen	750.000.000	APBD		12 dokumen	900.000.000
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Setwan	10 Orang	175.000.000	APBD		10 Orang	200.000.000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Setwan	70 orang	75.000.000	APBD		70 orang	100.000.000
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana Kerja DPRD	Setwan	1 dokumen	850.000.000	APBD		1 dokumen	1.400.000.000

	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi		100%	870.000.000	APBD		100%	3.070.000.000
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Setwan	1 dokumen	70.000.000	APBD		1 dokumen	70.000.000
	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	Setwan	3 dokumen	800.000.000	APBD		3 dokumen	3.000.000.000
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		81%	850.000.000	APBD		81%	800.000.000
	Penyusunan kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik dan tata beracara DPRD	Setwan	1 dokumen	350.000.000	-	-	-	-
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan Kode Etik DPRD	Setwan	4 laporan	500.000.000	APBD		4 laporan	800.000.000
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD terfasilitasi	Setwan	81%	13.989.415.000	APBD		81%	17.000.000.000
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Setwan	4 Dokumen	6.237.663.000	APBD		4 Dokumen	8.500.000.000
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan Kinerja fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	Setwan	1 laporan	850.000.000	APBD		1 laporan	1.500.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Banmus yang Terfasilitasi	Setwan	2 Dokumen	1.200.000.000	APBD		2 Dokumen	2.000.000.000
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang Terfasilitasi	Setwan	4 Dokumen	5.701.752.000	APBD		4 Dokumen	5.000.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kab. Mojokerto yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia”**, ditempuh melalui lima misi dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto melaksanakan misike 3 (tiga) yaitu **“Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal”** dengan tujuan RPJMD. Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 yang akan dilaksanakan melalui program – program Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

Program Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 merupakan deskripsi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten kota yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tidak mempunyai penelaahan usulan program dan kegiatan yang mendukung Program Tahun 2025 dimaksud dikarenakan tidak adanya keterkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD adalah OPD penunjang yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan uraian kegiatan Prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan pada Tabel Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

TABEL 4.1
REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA				LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		APBN		
					OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET			SKPD Terkait	PAGU (Rp)	K/L	Rp	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					Nilai SAKIP	81 (BB)	SET WAN	42.745.435.074					
							Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1							
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target		90%		10.000.000					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 dokumen	SET WAN	5.000.000					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6 laporan	SET WAN	5.000.000					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Presentase realisasi anggaran		85%	SET WAN	3.400.000.000					

					perangkat daerah										
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah orang yg menerima Gaji dan Tunjangan ASN per bulan			27/bulan	SET WAN	3.400.000.000						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			IP ASN		83	SET WAN	350.000.000						
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya			27 Stel/1 paket	SET WAN							
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan			70 orang	SET WAN	350.000.000						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100%	SET WAN	835.000.000						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 paket	SET WAN	250.000.000						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan			12 paket	SET WAN	35.000.000						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			1 paket	SET WAN	100.000.000						
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen bahan Bacaan			1 dokumen	SET WAN	00						

				dan Peraturan Perundang- Undangan										
		Penyediaan Bahan / Material		Jumlah paket bahan/ material (ATK) yang di sediakan			12 paket		100.000.000					
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu			12 laporan	SET WAN	150.000.000					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggara an rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	SET WAN	200.000.000					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Presentase penyediaan jaasa penunjang urusan pemerintah n daerah sesuai kebutuhan		84 %	SET WAN	2.280.000.000					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik			12 laporan	SET WAN	600.000.000					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12 laporan	SET WAN	1.680.000.000					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik		84 %	SET WAN	800.000.000					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak perijinan Kendaraan dinas operasional dan lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			27 unit	SET WAN	550.000.000					

				dan dipelihara di bayarkan pajaknya											
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi			1 unit	SET WAN	100.000.000						
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			58 unit	SET WAN	150.000.000						
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			Persentase layanan Keuangan dan Kesejahtera an DPRD	91%	92%	SET WAN	34.357.804.074						
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak Keuangan DPRD			50 orang/ bulan	SET WAN	33.472.804.474						
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan			150 paket	SET WAN	800.000.000						
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD			50 orang	SET WAN	85.000.000						
		Layanan Administrasi DPRD			Persentase layanan Administrasi DPRD	100%	100%	SET WAN	750.000.000						
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah laporan hasil Fasilitasi koordinasi dan Konsultasi DPRD			12 laporan	SET WAN	700.000.000						
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			Persentase Dukungan	70%		SET WAN							

						Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi			54.754.564.926					
						Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi	80%	SET WAN	8.892.043.126					
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan daerah dan peraturan DPRD terfasilitasi	85%	SET WAN	8.892.043.126					
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah		2 dokumen	SET WAN	1.200.000.000					
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			Jumlah dokumen hasil Raperda		8ndokumen	SET WAN	3.392.043.126					
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik			Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		4 dokumen	SET WAN	3.800.000.000					

		Penyusunan Tata tertib DPRD		Jumlah Dokumen tata tertib tersusun			1 dokumen		500.000.000					
				Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi			90%	SET WAN	8.110.000.000					
		Pembahasan Kebijakan Anggaran			Persentase dokumen kebijakan Anggaran dibahas		90%	SET WAN	8.110.000.000					
		Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS			1 dokumen	SET WAN	1.600.000.000					
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen hasil pembahasan KUA dan perubahan PPAS			1 dokumen	SET WAN	1.600.000.000					
		Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen hasil pembahasan APBD			1 dokumen	SET WAN	10.000.000					
		Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan			1 dokumen	SET WAN	1.600.000.000					
		Pembahasan Laporan Semester		Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD per semester			1 dokumen	SET WAN	900.000.000					
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD			1 dokumen	SET WAN	2.400.000.000					

						Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi	85%	SET WAN	16.400.000.000					
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi	85%	SET WAN	16.400.000.000					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum			Jumlah laporan hasil pengawasan Urusan Pemerintahan bidang pemerintahan dan Hukum		4 Laporan	SET WAN	3.000.000.000					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Infrastruktur		2 laporan	SET WAN	1.700.000.000					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat		4 laporan	SET WAN	3.000.000.000					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian		4 laporan	SET WAN	3.200.000.000					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan		2 laporan	SET WAN	1.700.000.000					

				bidang Sumber daya alam										
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK			1 dokum en	SET WAN	1.000.000.000					
		Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran			1 dokum en	SET WAN	1.200.000.000					
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungja waban kepala daerah			1 dokum en	SET WAN	1.600,000.000					
						Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan	90%	SET WAN	21.352.521.800					
		Peningkatan Kapasitas DPRD			Persentase peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi		90%	SET WAN	5.643.106.800					
		Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Orientasi DPRD			1 dokum en		532.391.000					
		Pendalaman Tugas DPRD		Jumal Dokumen Laporan hasil Pendalaman Tugas DPRD			6 dokum en	SET WAN	3.260.715.800					
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen penyebar luasan produk			12 dokum en	SET WAN	750.000.000					

				hukum daerah, publikasi dan Dokumentasi dewan											
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli			10 orang	SET WAN	175.000.000						
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah tenaga ahli Fraksi			70 orang	SET WAN	75.000.000						
		Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah dokumen rencana kerja DPRD			1 dokumen	SET WAN	850.000.000						
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			Persentase kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat terfasilitasi		100%	SET WAN	870.000.000						
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang tersusun			1 dokumen	SET WAN	70.000.000						
		Pelaksanaan Reses		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses			3 dokumen	SET WAN	800.000.000						
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD terfasilitasi		81%	SET WAN	850.000.000						
		Penyusunan Kode Etik		Jumlah dokumen Kode Etik tersusun			1 dokumen		350.000.000						
		Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD			4 laporan	SET WAN	500.000.000						

		Fasilitasi Tugas DPRD				Persentase tugas DPRD terfasilitasi		81 %	SET WAN	13.989.415.000					
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			4 Dokumen	SET WAN	6.237.663.000					
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			Jumlah laporan kinerja fraksi, alat klnkapan dan kinerja DPRD yang disusun			1 dokumen	SET WAN	850.000.000					
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus			4 Dokumen	SET WAN	1.200.000.000					
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			4 dokumen	SET WAN	5.701.752.000					
										97.500.000.000					

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan sebagai bahan penyusunan Perubahan KUPA-PPAS/R-APBDP Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan melalui perencanaan kegiatan yang berkualitas. Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto pada tahun 2024 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi.

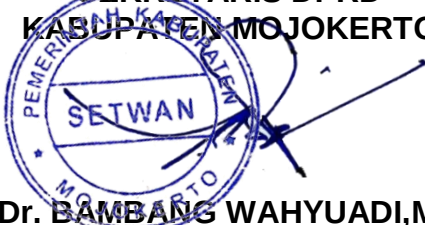
Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai perencanaan kegiatan berkualitas. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Sekretariat DPRD tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Bagian mengingat pewaktuan serta pencapaian indikator kinerja.
2. Renja Sekretariat DPRD tahun 2024, menjadi dasar bagi penyusunan perubahan RKAP/DPPA Sekretariat DPRD serta pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Rencana Kerja tahun 2024 merupakan refleksi dari asumsi ketercapaian indikator kinerja dengan memperhatikan evaluasi tahun anggaran 2023, guna mengantisipasi hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian berdasar hasil evaluasi pelaksanaan renja pada tahun 2023, dapat diketahui asumsi-asumsi pencapaian keberhasilan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam perubahan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021-2026.

Akhir kata, semoga Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO**

Dr. BAMBANG WAHYUADI, MH
Pembina Utama Muda
NIP.196710201989031009